

# JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia \_\_\_\_\_ 1-12  
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen \_\_\_\_\_ 13-23  
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan \_\_\_\_\_ 24-38  
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara \_\_\_\_\_ 39-52  
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional \_\_\_\_\_ 53-63  
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam \_\_\_\_\_ 64-74  
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat \_\_\_\_\_ 75-85  
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi \_\_\_\_\_ 86-97  
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu \_\_\_\_\_ 98-109  
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat \_\_\_\_\_ 110-120  
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI  
MASA PANDEMI**

**RIFQAH ANISA HENI NASUTION**

**Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jln. Jendral Ahmad Yani Kisaran  
Email : rifqahheni@gmail.com**

**DANY TRY HUTAMA HUTABARAT**

**Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jln. Jendral Ahmad Yani Kisaran  
Email: Danytryhutamahutabarat@gmail.com**

**ABSTRAK**

Covid-19 atau yang biasa disebut Corona virus adalah sebuah wabah atau virus yang berasal dari Wuhan yang sejak 2 tahun terakhir ini, dan kemudian organisasi kesehatan dunia) menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona ini. Akibat dari pandemi Covid-19 ini, banyak sekali sektor kehidupan masyarakat yang berubah. Dampaknya multisektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang dan paling dan paling keras menghantam masyarakat miskin dan rentan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di lingkungan kehidupan masyarakat serta masalah-masalah sosial lainnya. dikarenakan dari pembatasan sosial yang berskala besar yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka pada masa pandemi meningkat hingga angka 7,07%. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran tersebut, pada 2021 penduduk miskin bertambah menjadi 10,4% dari 9,78% pada 2020. Kebijakan Pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi dan terdapat beberapa kebijakan alternatif.

**Kata Kunci :** *Kemiskinan, Pandemi Pemerintah, Pengangguran*

## LATAR BELAKANG

Covid-19 atau yang biasa disebut corona virus adalah sebuah wabah atau virus yang berasal dari Wuhan yang telah menyebar keseluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia, sejak 2 tahun terakhir ini. dan kemudian organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona ini. Virus ini telah menyebabkan pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Akibat dari pandemi Covid-19 ini, banyak sekali sektor kehidupan masyarakat yang berubah, baik dari dunia kesehatan hingga sosial-ekonomi.<sup>1</sup>

Dampaknya Multi sektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang dan paling dan paling keras menghantam masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 april 2020.

<sup>1</sup>[www.bappenas.co.id](http://www.bappenas.co.id), Studi dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia, diakses pada tanggal 22 februari 2022

Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial besrakala besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Berdasarkan hasil sigi yang diliris oleh lembaga survey charta politika Indonesia<sup>2</sup>, dapat dilihat dari table dibawah ini :

**Tabel 1. Persentase dampak ekonomi akibat pandemi**

Dampak	Perse ntase
Penghasilan berkurang	60%
Kehilangan pekerjaan	20 %
Harus belajar dari rumah	15%
Membiasakan 5M	5%
Lebih taat beribadah	5%
Harus bekerja dari rumah	4%

<sup>2</sup><https://data.tempo.co/data/1195/dampak-pandemi-covid-19-paling-berat-penghasilan-berkurang>, diakses pada tanggal 23 februari 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan masalah ekonomi yang terjadi di masa pandemi sangat besar, hal ini tentunya akan berdampak besar terhadap timbulnya berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu diantaranya yaitu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat serta masalah-masalah sosial lainnya. Hal ini dikarenakan dari pembatasan sosial yang berskala besar yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19. Namun dibalik hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan penekanan masalah ekonomi ditengah-tengah masyarakat dimasa pandemi ini, agar pengangguran dan kemiskinan tidak terus meningkat. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ditengah merebaknya covid-19 ini ialah PP No 7 Tahun 2020.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan dan menemukan fakta dan yang akan dimuat dalam tulisan

ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif*. Dalam penelitian dalam menemukan data dan fakta-fakta terbaru, diambil dari berbagai media online maupun non-online, seperti situs-situs berita online, pdf, serta beberapa tulisan penulis lainnya yang digunakan sebagai pedoman, adapun media non-online seperti beberapa jenis buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis dalam jurnal ini. Dalam pengambilan data dan sampel, digunakan cara dan teknik analisis yang dimuat diberbagai media, guna mencegah adanya berita atau data yang tidak valid dari media yang diambil.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian hukum disebut bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik

pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.<sup>3</sup>

Pembahasan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.<sup>4</sup>

Seperti meneliti kasus-kasus yang terjadi akibat penyebaran covid-19, menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, dan menilai upaya-

upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut di tengah- tengah pandemi. Materi ini adalah materi yang diangkat oleh penulis dikarenakan berhubungan dengan mata kuliah sosiologi hukum yang berkaitan dengan masalah sosial, dan sampai saat ini menjadi tantangan dan problematika utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Meningkatnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia selama pandemi**

Pandemi yang tak kunjung berakhir menjadi tantangan dan masalah utama dibidang ekonomi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah kebawah. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini telah memberikan dampak yang besar bagi kondisi kemiskinan dan ketimpanganyang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kenaikan angka di Indoensia. Hal ini terlihat dari bagaimana angka kemiskinan pada September 2020 meningkat dibandingkan maret 2020, terlebih lagi jika dibandingkan

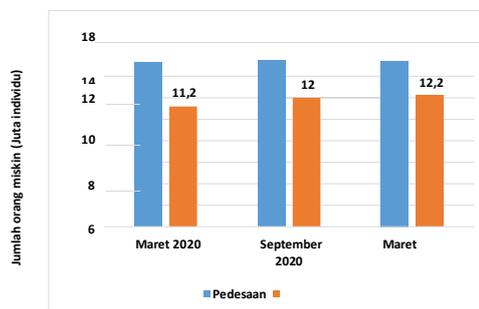
---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 24

<sup>4</sup>Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 60

dengan jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebelumnya terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Kondisi peningkatan angka kemiskinan ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah : PSBB pada april 2020 yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dari hasil penelitian kemiskinan pertama dalam tiga atahun terakhir oleh virus corona, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Adapun persentase meningkatnya angka kemiskinan yang terjadi di di Indonesia selama pandemi dapat kita analisa melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Jumlah Orang Miskin di Indonesia 2020-2021**



Source : [smeru.or.id](http://smeru.or.id)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa memang persentase angka kemiskinan di Indonesia semakin

meningkat sejak pandemi muncul. Tidak dapat dipungkiri, pandemi berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan sejak maret 2020. Dilansir dari halaman Tempo.com. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan diantaranya :<sup>5</sup>

1. Pandemi sebabkan perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk
2. Ekonomi Indonesia triwulan III 2020 terhadap triwulan III 2019 mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen.
3. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi keluarga pada produk domestic Bruto (PDB) melambat.
4. Angka Inflansi meningkat.
5. Secara Nasional harga bahan-bahan pokok naik.
6. Tingkat pengangguran terbuka meningkat.
7. Penduduk yang terdampak covid-19 meningkat membuat pemerintah haru mengeluarkan kebijakan PSBB yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia.

<sup>5</sup>Tempo.com Jakarta-BPS, diakses pada tanggal 24 Februari 2021

Dari beberapa faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa memang masalah sosial yang timbul akibat pandemi kemiskinan lah yang paling meningkat, tentu saja hal ini berimbang pada angka pengangguran yang terjadi . pada dasarnya pengangguran adalaah salah satu faktor yang paling besar dalam masalah meningkatnya angka kemiskinan pada di Indonesia, khususnya pada masa pandemi Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka pada masa pandemi meningkat hingga angka 7,07 %.<sup>6</sup> Dengan bertambahnya tingkat pengangguran tersebut, pada 2021penduduk miskin bertambah menjadi 10,4% dari 9,78% pada 2020. Angka pengangguran di Indonesia pada masa pandemi disebabkan oleh beberapa hal berikut:<sup>7</sup>

1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang
2. Banyaknya perusahaan-

perusahaan yang menutup atau pun ditutup operasionalnya, yang mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, padaakhir Juli 2020 Kementrian Ketenaga kerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta lebih.<sup>6</sup> Inilah salah satu penyebab pengangguran terbesar pada masa pandemi

3. Adanya lockdown dan PSBB membuat pengguna barang atau jasa sepi pelanggan sehingga membuat usaha-usaha dibidang ekonomi tutup yang menyebabkan mereka menganggur
4. Adanya rasa takut yang besar terhadap aturan pemerintah untuk dirumah saja selama pandemi. Hal ini membuat masyarakat terbatas didalam bekerja ataupun melaksanakan aktifitas usaha lainnya.

Secara garis besar beberapa faktor diatas adalah penyebab utama

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Abd Jalil dan Sri Kasnelli, Meningkatkan Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi Covid-19, *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, Edisi 2* Desember 2019, hlm.54

angka pengangguran dimasa pandemi ini meningkat pesat.

Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja ini dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Pengangguran adalah orang yang belum melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas hanya pada orang yang belum bekerja tetapi orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran.<sup>8</sup>

### **B. Peran dan kebijakan pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia selama pandemi.**

Masalah sosial yang paling besar terjadi dimasa pandemi seperti pengangguran dan kemiskinan telah menimbulkan dampak dan kebiasaan yang baru bagi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang membuat pemerintah turut mengambil kebijakan untuk mengatasi dan menekan peningkatan kemiskinan dan pengangguran tersebut. Adapun

kebijakan pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi yaitu : Pemerintah mengeluarkan PP terbaru yaitu : PP No.7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah.

Peraturan ini menekankan pemerintah memberikan subsidi untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. UMKM ini dapat menjadi solusi strategis untuk mengakomodasi kebutuhan impor yang saat ini tengah macet. Menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar 123,46 Triliun untuk mendukung UMKM. Posisi kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM ditriwulan II pada tahun 2014 mencapai Rp. 44,16 triliun, tumbuh menjadi 8,69% atau 17,79%.

Penyaluran dana bansos oleh pemerintah Salah satu alternatif yang ditempuh pemerintah dalam melaksanakan integrasi penyaluran bansos kepada masyarakat salah satunya dengan cara menggandeng

---

<sup>8</sup>Sadono sukino, *Makro Ekonomi Modern*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.8

bang bang pemerintah untuk melakukan transfer bansos secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan.

Sesuai dengan permensos (Peraturan Menteri Sosial) Republik Indonesia No.1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian sosial.

Bansos adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa pada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.<sup>9</sup>

Tujuan bansos ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran bansos non tunai disalurkan melalui bank penyalur kerekening penerima bansos. Penerima bantuan sosial sebelumnya telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Verifikasi dan validasi bagi calon penerima bansos sebelumnya sudah dijamin kebenaran datanya. Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) disetujui oleh DPR. Kuasa pengguna

anggaran (KPA) adalah pejabat yang memiliki kuasa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab terhadap kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Bank penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bansos untuk menampung dana belanja bansos yang akan disalurkan kepada penerima bansos. Uang elektronik yaitu alat pembayaran yang diterbitkan. dan dapat digunakan sebagai alat penyaluran bansos.

Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yaitu inspektorat jenderal kementerian provinsi atau kabupaten. Implementasi bansos ini meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Kebijakan pemerintah ini, dinilai cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran dimasa pandemi. Namun, tidak menutup kemungkinan ada banyak problematika dalam integrasi kebijakan ini. Salah satunya yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Sosial) Republik Indonesia No.1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian social, Pasal 1 Angka 1

---

<sup>10</sup>Ilona Edria Santa, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks Covid-19 Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Juristic, Volume 02 Nomor 1 April 2021, hlm.96

- a. Tidak terdaftar secara menyeluruh masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah
- b. Penyaluran dana bansos yang tidak tepat dan tidak merata, menyebabkan banyak terjadi ketimpangan ekonomiditengah-tengah masyarakat.
- c. Adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat penyalur dana bansos.
- d. Pengawasan dalam penyaluran bansos masih lemah.

Meskipun demikian kebijakan ini cukup signifikan dalam menjaga kestabilan perekonomian indonesia pada masa pandemi. Pemberian Kartu Prakerja dan Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kartu prakerja. Sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2020 (perubahan perpres No.36 Tahun 2020) serta permenko Bidang perekonomian No.11 tahun 2020 (perubahan permenko No.11 Tahun 2020), serta PMK No.25 Tahun 2020.

1. Kartu prakerja adalah program pengembangan yang ditujukan terhadap para pencari kerja, atau bisa disebut sebagai kartu

identitas keja.

2. Pekerja yang dimaksud adalah orang yang bekerja yang menerima gaji/ upah dalam bentuk lain.
3. Pemberian kartu prakerja di prioritas kepada yang terdampak *corona virus disease* dan yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah sama sekali.
4. Pembentukan pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Impelementasi pemberian kartu prakerja ini diharapkan mamp menekan angka pengangguran kepada para pekerja di masa pandemi. Pengelolaan APBN secara cermat dapat Meningkatkan interfensi pemerintah dalam mengatasi pandemi tentunya berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah. Hal ini mewajibkan pemerintah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah disusun dalam menerapkan beberapa kebijakan alternatif yang di keluarkan dalam mengatasi masalah sosial khususnya kemiskinan dan pengangguran pada masa pandemi.

Beberapa kebijakan alternatif meliputi :

- a. Melakukan realokasi sebagian APBN dan melakukan pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Melakukan realokasi anggaran program kartu pra-kerja khususnya kepada angkatan kerja yang menganggur akibat PHK.

Beberapa kebijakan dan upaya telah dilakukan pemerintah semaksimal mungkin dalam menekan angka pengangguran. Dalam pemaparannya menko kemaritiman dan investasi menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah diatas yang dilakukan secara bertahap mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada masa pandemi.<sup>11</sup>

Meskipun secara nyata, perekonomian dan masalah sosial, khususnya kemiskinan dan pengangguran pada masa pandemi belum seluruhnya teratasi, namun dengan demikian pemerintah telah

memberikan upaya dan peran semaksimal mungkin dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia pada masa pandemi .

## **SIMPULAN**

Covid-19 atau yang biasa disebut Corona virus adalah sebuah wabah atau virus yang berasal dari Wuhan yang sejak 2 tahun terakhir ini. dan kemudian organisasi kesehatan dunia) menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona ini. Akibat dari pandemic Covid-19 ini, banyak sekali sektor kehidupan masyarakat yang berubah, Dampaknya Multisektoral dan efeknya akan terlihat dalam jangka waktu panjang dan paling dan paling keras menghantam masyarakat miskin dan rentan. meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di lingkungan kehidupan masyarakat serta masalah-masalah sosial lainnya. dikarenakan dari pembatasan sosial yang berskala besar yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) ,pengangguran terbuka pada masa pandemi

---

<sup>11</sup>*Ibid*

meningkat hingga angka 7,07 % . Dengan bertambahnya tingkat pengangguran tersebut, pada 2021 penduduk miskin bertambah menjadi 10,4% dari 9,78% pada 2020. Kebijakan Pemerintah Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Yaitu : Pemerintah mengeluarkan PP terbaru yaitu : PP No.7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah.diantaranya adalah : penyaluran dana bansos oleh pemerintah, pemberian kartu prakerja, pengelolaan APBN secara cermat kemudian Dan terdapat beberapa kebijakan alternatif yang meliputi: melakukan realokasi sebagian APBN dan melakukan pembagian beban antara pemerintah pusat dan daerah dan melakukan realokasi anggaran program kartu pra-kerja khususnya kepada angkatan kerja yang menganggur akibat PHK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sadono sukino, *Makro Ekonomi Modern*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009

### B. Jurnal

Abd Jalil dan Sri Kasnelli, Meningkatkan Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi Covid-19, *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Edisi 2 Desember 2019

Ilona Edria Santa, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks Covid-19 Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Juristic*, Volume 02 Nomor 1 April 2021

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial) Republik Indonesia No.1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial dilingkungan kementerian sosial

### D. Naskah Internet

<https://data.tempo.co/data/1195/dampak-pandemi-covid-19->

paling-berat-penghasilan-  
berkurang

Tempo.com Jakarta-BPS

[www.bappenas.co.id](http://www.bappenas.co.id), Studi dampak  
sosial-ekonomi pandemi  
COVID-19 di Indonesia